



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUH PUTU SRI ARMINI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 65886

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.374.392.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/129 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 302.385.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 234.960.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 452.744.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 249.303.000
5. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 67.500.000
6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HADIAH Rp. 67.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 218.605.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO J 54P (CASTWHEEL) A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.800.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO GT BU9 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.805.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000



5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.100.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	748.805.050
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.354.902.050
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.354.902.050

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.